

**PENGAWASAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA JAMBI
DALAM PENDISTRIBUSIAN LPG SUBSIDI 3 KG DI KECAMATAN PAAL
MERAH KOTA JAMBI**

Yuli Rahmawati¹, Citra Darminto², Dinda Rosanti Salsa Bella³

¹²³Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi

yulirahmawati0704@gmail.com, citradarminto@unja.ac.id,

dindasalsabela@unja.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the supervision carried out by the Jambi City Department of Trade and Industry in the distribution of 3 kg subsidized LPG in Paal Merah District. The study is based on Regional Regulation No. 10 of 2013 concerning the control and supervision of LPG distribution. A descriptive qualitative method was employed using observation, interviews, and documentation. The analysis adopted Robbins and Coulter's supervision stages: setting standards, measurement, comparison, and corrective action. The findings indicate that supervision has been implemented through socialization, monitoring, and guidance for agents and distributors. However, it remains ineffective due to mistargeted distribution, the use of subsidized LPG by higher-income households, limited human resources, and non-compliance by some distributors. These issues have generated public complaints. The study concludes that stronger supervision and stricter enforcement are required to ensure effective and targeted LPG distribution.

Keywords: *Supervision, Distribution, 3 Kg LPG Gas, Red Flag, Department of Trade and Industry, Jambi City*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan pengawasan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dalam pendistribusian LPG subsidi 3 kg di Kecamatan Paal Merah. Penelitian dilatarbelakangi oleh Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Distribusi LPG 3 Kg Bersubsidi sebagai dasar hukum pelaksanaan pengawasan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis pengawasan mengacu pada teori Robbins dan Coulter yang meliputi penetapan standar, pengukuran, perbandingan, serta tindakan dan koreksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan telah dilaksanakan melalui sosialisasi, pemantauan distribusi, dan pembinaan kepada agen serta pangkalan. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih ditemukan distribusi yang tidak tepat sasaran, penggunaan LPG subsidi oleh masyarakat mampu, keterbatasan sumber daya manusia dalam pengawasan, serta praktik pangkalan yang membatasi waktu

penjualan. Kondisi tersebut menimbulkan keluhan masyarakat terkait ketersediaan LPG subsidi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengawasan distribusi LPG subsidi 3 kg di Kecamatan Paal Merah masih perlu ditingkatkan melalui pengawasan yang lebih intensif dan tindakan yang lebih tegas terhadap pelanggaran agar distribusi berjalan efektif dan tepat sasaran.

Kata Kunci: Pengawasan, Pendistribusian, Gas LPG 3 Kg, Paal Merah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Kota Jambi

A. Pendahuluan

Peralihan konversi dari minyak tanah ke LPG sejak tahun 2007 merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam pembatasan penggunaan minyak tanah untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat (Kholilah Lubis, 2022). Tujuan dari program pengalihan minyak tanah ke LPG ini ialah untuk melakukan diverifikasi pasokan energi agar tidak terlalu bergantung pada BBM, khususnya minyak tanah. Selain itu, langkah ini juga bertujuan mencegah penyalahgunaan minyak tanah bersubsidi, meningkatkan efisiensi anggaran pemerintah terkait subsidi, serta menghadirkan bahan bakar yang lebih praktis dan ramah lingkungan bagi rumah tangga maupun usaha mikro.

Dalam pendistribusian LPG, khususnya LPG 3 Kg diberikan dalam bentuk bersubsidi, maka perlu adanya pengawasan dalam kegiatan usaha tersebut, terutama dari pemerintah yang berwenang, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 pasal 41 ayat (1) tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa tagging jawab kegiatan pengawasan atas pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terhadap ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berada pada departemen

yang dibidang tugas dan kewenangan meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan departemen lain yang terkait.

Dalam mekanisme penyaluran tabung gas LPG dengan distribusi LPG 3 Kg yang pertama berasal dari depot LPG kemudian dari depot LPG jalur berikut SPPBE (Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji) yang dikelola oleh Pertamina dan pihak swasta, setelah itu paket elpiji diterima oleh agen dan agen sampailah kepada sub penyalur atau pangkalan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. pendistribusian gas LPG 3 Kg bersubsidi seluruh wilayah di Kota Jambi di mulai dari SPBE sebagai tempat produksi gas LPG 3 Kg, dari SPBE gas LPG 3 Kg didistribusikan kepada penyalur/agen. Selanjutnya agen menyalurkan kepada sub penyalur/pangkalan dengan harga jual Rp. 14.200/tabung gas LPG 3 Kg, Kemudian pangkalan menyalurkan kepada konsumen dengan harga Rp. 17.000/tabung, konsumen gas LPG 3 Kg bersubsidi merupakan masyarakat miskin yang memiliki kartu kendali dan UMKM. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dalam melaksanakan Pengawasan distribusi LPG 3 Kg mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Distribusi Liquefied

Petroleum Gas Tabung 3 (Tiga) Kilogram Bersubsidi yang dijadikan dasar hukum Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi untuk melakukan pengawasan dan membuat SOP untuk tingkat sub penyalur atau pangkalan Gas LPG 3 Kg, dalam pendistribusian ini dilakukan dari Pertamina, kemudian menyalurkan kepada penyalur-penyalar resmi yang ada di Kota Jambi, selanjutnya didistribusikan kepada pangkalan-pangkalan yang sudah terdaftar di penyalur tersebut.

Kota Jambi merupakan salah satu wilayah yang sering sekali mengalami permasalahan pendistribusian gas LPG 3 Kg, terutama pada Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, yang dimana tabung gas LPG 3 Kg, yang seharusnya diperuntukkan bagi rumah tangga dan pelaku usaha mikro. Kelangkaan dan HET yang terjadi ini bukan semata-mata karena kurangnya pasokan, melainkan lebih disebabkan oleh penyaluran yang tidak tepat sasaran. Dari temuan di lapangan warga mengeluhkan tidak mendapatkan gas dipangkalan di kecamatan paal 5 merah, dikarenakan pemilik pangkalan memberikan aturan tersendiri. Hal ini menyebabkan distribusi gas tidak seimbang, dimana masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru kesulitan untuk mendapatkannya.

Sebagai respon terhadap permasalahan ini Dalam hal itu diperlukannya peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama Pemerintah Kota Jambi berupaya mengatasi permasalahan ini dengan melakukan pengawasan terhadap pendistribusian LPG 3 Kg. Pengawasan tersebut sangat penting untuk memastikan kelancaran, keterjangkauan layanan, serta terpenuhinya kebutuhan LPG 3 Kg

bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pemantauan yang ketat guna mencegah terjadinya penyimpangan distribusi, pelanggaran terhadap harga eceran tertinggi (HET), kelangkaan, maupun penyalahgunaan LPG 3 Kg (Mukhalladun, 2022). Pengawasan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa pendistribusian gas LPG 3 Kg tepat pada sasaran dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat terutama masyarakat kalangan bawah, Pengawasan yang berpihak pada kepentingan masyarakat kecil dan kurang mampu saat ini sangat dibutuhkan guna meningkatkan harkat hidup kelompok yang terpinggirkan. Karena pengawasan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan sumber daya alam, maka penerapannya harus selaras dengan asas distribusi LPG 3 Kg (Septiana, 2024).

Penelitian (Siahaan, 2024) bagaimana pengawasan pendistribusian Gas Lpg Subsidi 3 Kg yang dilakukan oleh Dinas Kopersi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kota Medan dengan permasalahan belum optimalnya pengawasan atau control dari tingkat provinsi maupun pusat, serta belum terlaksananya koordinasi pengendalian dalam menyelesaikan masalah yang ada. Hal ini dapat menjadi dasar untuk evaluasi ulang dan sosialisasi kembali kebijakan kepada penyalur terutama dalam hal jual gas, sert bertindak lebih tegas dalam menerbitkan pengecer yang sama hari kian bertambah. Kemudian mengantisipasi adanya perbedaan harga jual.

Dengan adanya permasalahan pengawasan yang dilakukan oleh

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dalam pendistribusian LPG 3 Kg di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi. Untuk mengetahui proses pengawasan terhadap pendistribusian Gas Subsidi 3 Kg di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas wawasan serta mendukung pengembangan Ilmu Pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan konsep implementasi tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan otonomi daerah. serta dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan kinerja organisasi pemerintahan pada umumnya.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada tujuan penelitian untuk menelaah secara mendalam praktik anatar actor berdasarkan teori pengawasan yang di kemukakan oleh Robbins and Coulter dalam Satriadi (2016). Melalui studi kasus, 28

peneliti dapat menelusuri intraksi dan pola-pola kerja sama yang terbentuk secara langsung serta menghimpun informasi dari berbagai sumber guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap objek penelitian.

Penelitian ini akan melakukan observasi, wawancara, serta dokumentasi. Ketiga teknik ini digunakan secara bersamaan untuk mendapatkan data yang akurat, mendalam, dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Teknik-teknik ini membantu penelitian memahami peran serta para pihak dalam pendistribusian LPG 3 Kg di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi.

2.1 Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data, Penelitian ini akan melakukan observasi, wawancara, serta dokumentasi. Ketiga teknik ini digunakan secara bersamaan untuk mendapatkan data yang akurat, mendalam, dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Teknik-teknik ini membantu penelitian memahami peran serta para pihak dalam pendistribusian LPG 3 Kg di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi. Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing teknik pengumpulan

data dapat dijabarkan sebagai berikut
:. a. Obsevasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung aktivitas, perilaku, serta situasi nyata dilapangan menggunakan seluruh pasca indra (Suwendra, 2018). Peneliti melakukan pengamatan langsung di sejumlah pangkalan resmi LPG yang tersebar di berbagai kecamatan, guna melihat bagaimana mekanisme penyaluran berjalan dari agen ke pangkalan, hingga sampai ke tangan konsumen.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara mengajukan persyaratan secara langsung kepada informan atau narasumber yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dengan tujuan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai mekanisme pengawasan distribusi LPG 3 Kg, kebijakan yang diterapkan, serta kendala-kendala

yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan teknik pengumpulan yang digunakan untuk menelusuri dan mengumpulkan berbagai dokumen tertulis, maupun digital yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, maupun karya monumental seseorang. Dokumen tertulis misalnya catatan harian, riwayat hidup, cerita, biografi, peraturan, atau kebijakan.

2. 2 Teknik Analisis Data

Penelitian menggunakan teknik analisis dari model miles dan huberman dalam Sugiono (2014) yang dikenal sebagai model analisis data interaktif, model ini menekankan bahwa analisis data dilakukan secara simultan dan berkesinambungan sejak data mulai dikumpulkan hingga seluruh proses penelitian selesai. Tiga tahapan utama dalam model mencakup reduksi data, data penyajian, serta verifikasi dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi data

Reduksi merupakan tahapan awal dalam analisis yang bertujuan untuk menyederhanakan data mentah

yang diperoleh dari catatan lapangan, wawancara, dan dan dokumen lainnya. Melalui proses ini, peneliti memilih dan mamfokukan data yang relevan, menghapus informasi yang tidak mendukung, serat menyusun kategori tematik berdasarkan focus penelitian.

b. Penyajian data

Setelah proses redukasi selesai dilakukan, langkah selanjudnya adalah menyajikan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan dianalisis lebih lanjut. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan engan cara enyusun informasi dalam bentuk narasi deskriptif, table, matriks, serta menghubungkan antar kategori 34 untuk memperjelas struktur data yang telah dianalisis. Bentuk penyajian ini memungkinkan peneliti dapat membaca untuuk melihat polaserta kecendrunngan yang muncul dari hasil temuan di lapangan

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Tahap akhir dari proses analisis adalah verivikasi dan penarikan kesimpulan yang bersifat sementara maupun final. Pada tahap ini, peneliti mulai merumuskan makna dari data yang telah disajikan dan mengevaluasi konsistensi temuan

melalui trigulasi serta validasi data. Kesimpulan awal yang diperoleh dapat bersifat tentative dan perlu dikaji kembali jika ditemukan informasi baru dari responden atau dokumen tambahan.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pembahasan dalam bab ini disusun dengan menggunakan kerangka pengawasan menurut Robbins dan Cultur dalam Satriadi (2016), yang mencakup tahapan menetapkan standar, pengukuran, perbandingan, dan pengambilan tindakan. Keempat tahapan tersebut digunakan untuk menelusuri proses pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg di Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, penetapan standar distribusi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian, pemantauan pelaksanaan di lapangan, evaluasi kesesuaian distribusi dengan standar, hingga pengambilan tindakan korektif jika ditemukan penyimpangan.

Pelaksanaan pengawasan Pendistribusian gas LPG 3 Kg melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dengan melakukan pendataan disetiap pembagian gas LPG 3 Kg dengan tujuan adanya ketetapan distribusi

sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku serta kegiatan pengawasan mulai dari dari pembagian gas LPG 3 Kg sampai ke pangkalan dan kegiatan pengeceran pangkalan terhadap masyarakat dengan mengawasi penerima gas LPG 3 Kg dalam Kategori rumah tangga menengah kebawah dan memiliki kartu kendali, dalam melakukan pengawasan harga yang sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam pengawasan distribusi gas LPG 3 Kg di Kecamatan Paal Merah, terjadi dinamika dan kolaborasi antara penyalur, sub-penyalar, dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi. Dinas ini cenderung berperan sebagai pelaksana pengawasan administratif, sementara masyarakat merasakan langsung dampak dari pengawasan ini. Untuk memahami dinamika ini secara lebih sistematis, peneliti menggunakan tahapan pengawasan menurut Robbins dan Culture dalam Satriadi (2016), yang mencakup Standards (Standar), Measurement (Pengukuran), Compare (Perbandingan), dan Action (Tindakan). Tahapan ini digunakan

untuk mengevaluasi implementasi pengawasan distribusi gas LPG 3 Kg yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi.

3.1 Menetapkan Standar Pelaksanaan (Standards) dalam Pendistribusian gas LPG 3 Kg di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi

Berdasarkan temuan lapangan, pengawasan distribusi gas LPG 3 kg di Kota Jambi dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari penetapan standar hingga tindakan korektif. Penetapan standar ini merujuk pada Perda Kota Jambi No. 10 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan distribusi gas bersubsidi. Standar tersebut menjadi patokan bagi Disperindag untuk menilai apakah distribusi gas sudah tepat sasaran. Sosialisasi dilakukan kepada agen dan pangkalan agar distribusi hanya diberikan kepada rumah tangga miskin dan pelaku UMKM yang berhak. Selain itu, agen dan pangkalan diingatkan agar tidak menjual gas ke pihak yang tidak berwenang. Bapak Dadan Sulaiman menekankan bahwa sosialisasi ini bertujuan mencegah penyalahgunaan yang merugikan masyarakat. Dalam implementasinya, pengawasan

mencakup ketersediaan stok, kepatuhan harga sesuai HET, dan ketepatan sasaran distribusi. Temuan menunjukkan bahwa meskipun sosialisasi telah dilakukan, masih ditemukan kendala terkait distribusi yang tidak tepat sasaran. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pengawasan berjalan tetapi efektivitasnya belum optimal.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan distribusi gas LPG 3 kg, perlu dilakukan beberapa langkah strategis. Pertama, meningkatkan frekuensi pengawasan dan sosialisasi agar distribusi gas tepat sasaran. Kedua, menambah kapasitas SDM Disperindag agar pengawasan rutin dapat berjalan secara konsisten. Ketiga, memperkuat pengawasan di tingkat pengecer agar harga tetap sesuai HET. Keempat, memanfaatkan sistem informasi digital untuk memantau stok, distribusi, dan kepatuhan harga secara real-time. Dengan langkah langkah ini, distribusi gas LPG 3 kg dapat lebih tertib, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat yang berhak menerima subsidi.

3.2 Pengukuran (Measurement) Pelaksanaan dalam Pengawasan

Pendistribusian gas LPG 3 Kg di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi

Terkait distribusi gas LPG 3 kg menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan memiliki peran sentral dalam memastikan distribusi tepat sasaran. Mengacu pada teori pengawasan Robbins dan Coulter, pengawasan dilakukan dengan membandingkan antara standar yang ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan. Dalam konteks distribusi LPG 3 kg, indikator pengukuran pelaksanaan kegiatan meliputi ketepatan penerima, pencatatan pemasukan tabung, serta pencatatan penyaluran ke masyarakat. Temuan menunjukkan bahwa meskipun prosedur administratif seperti kartu kendali dan sistem digital MyPertamina diterapkan, terdapat tantangan dalam implementasi, terutama terkait kepatuhan masyarakat dan praktik penyimpangan di pangkalan Kartu kendali, yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, berfungsi sebagai alat kontrol utama untuk memastikan gas bersubsidi disalurkan kepada penerima yang berhak. Hal ini sesuai dengan prinsip pengawasan Robbins dan Coulter, yakni pengawasan bersifat preventif

dan korektif, bukan hanya reaktif terhadap masalah. Namun, temuan lapangan mengindikasikan variasi praktik di tingkat pangkalan; beberapa pangkalan tetap mewajibkan kartu kendali, sementara yang lain mengandalkan sistem digital berbasis NIK KTP, yang meskipun memudahkan pengawasan dan mengurangi antrian, memiliki celah dalam verifikasi status sosial ekonomi konsumen. Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan kontrol internal dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban sebagai penerima subsidi. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menekankan bahwa keberhasilan program subsidi tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan sistem pengawasan, tetapi juga oleh kepatuhan dan partisipasi aktif masyarakat.

Pengawasan tidak cukup dilakukan secara formal melalui kartu kendali atau sistem digital, tetapi juga harus melibatkan pemantauan perilaku penerima dan pelaku distribusi. Secara implikatif, temuan ini memberikan pemahaman bahwa digitalisasi dan penggunaan kartu kendali meningkatkan efisiensi dan

akurasi pengawasan, tetapi masih perlu dikombinasikan dengan edukasi masyarakat dan pengawasan 73 lapangan untuk memastikan distribusi subsidi benar-benar tepat sasaran. Dengan demikian, diskusi ini menunjukkan keterkaitan yang jelas antara teori pengawasan, praktik distribusi LPG 3 Kg, dan tantangan implementasi di lapangan, sekaligus memberikan dasar analitis untuk rekomendasi perbaikan kebijakan dan prosedur pengawasan.

3.3 Membandingkan (Compare) Pelaksanaan Pengawasan dan Pendistribusian gas LPG 3 Kg di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi

Berdasarkan hasil observasi lapangan, pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi di Kecamatan Paal Merah menunjukkan adanya keterbatasan signifikan dari pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi. Meskipun pengawasan seharusnya rutin dan menyeluruh sesuai Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2013, kenyataannya pengawas hanya melakukan kunjungan sampel beberapa pangkalan setiap bulan.

Hal ini terjadi karena jumlah pengawas terbatas, sementara

jumlah pangkalan yang harus diawasi cukup banyak. Kondisi ini menyebabkan ketidakteraturan dalam pemantauan dan memungkinkan munculnya penyimpangan operasional, seperti pembatasan jam pengambilan gas secara sepihak oleh pangkalan, pengalihan tabung kepada pihak yang tidak berhak, serta miskomunikasi antara pangkalan dan masyarakat pemegang kartu kendali. Analisis kritis terhadap situasi ini menunjukkan bahwa pengawasan yang terbatas bukan hanya persoalan kuantitas SDM, tetapi juga menyangkut efektivitas koordinasi dan sistem kontrol. Keterbatasan pengawasan mengakibatkan praktik lapangan tidak selalu sejalan dengan standar yang telah 79 ditetapkan. Oleh karena itu, Dinas perlu meningkatkan kapasitas pengawas, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi, sehingga kunjungan ke pangkalan dapat dilakukan lebih rutin dan menyeluruh. Kedua, pengawasan sebaiknya didukung oleh sistem digital berbasis NIK yang memungkinkan tracking distribusi secara real-time, sehingga penyimpangan dapat terdeteksi sejak dini. Ketiga, koordinasi dengan aparat

lokal seperti camat, lurah, dan RT harus dioptimalkan untuk memperkuat monitoring di tingkat masyarakat. Keempat, perlu dibangun mekanisme pengaduan yang aman dan anonim bagi warga, sehingga mereka dapat melaporkan penyimpangan tanpa takut kehilangan haknya. Terakhir, pangkalan harus diberikan pelatihan dan sosialisasi mengenai prosedur distribusi dan hak masyarakat, agar mereka tidak membuat aturan sendiri yang menyimpang dari standar.

3.4 Pengambilan Tindakan dan Koreksi (Action) Pelaksanaan Pengawasan pendistribusian gas LPG 3 Kg di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi serta agen gas LPG 3 kg PT. Paal Merah Sumber Rezeki, terlihat bahwa mekanisme pengawasan pendistribusian LPG sudah 81 memiliki prosedur sanksi yang jelas jika terjadi pelanggaran atau penyimpangan di pangkalan. Sanksi ini diterapkan secara bertahap sesuai tingkat kesalahan. Tahap pertama, SP1, merupakan teguran lisan yang diberikan sebagai peringatan awal

kepada pangkalan. Jika pangkalan melakukan kesalahan yang sama kembali, maka diberikan SP2 berupa pengurangan alokasi gas sebesar 40–60% dari kuota yang seharusnya. Tahap terakhir, SP3, adalah teguran terakhir yang berupa PHU (Pemutus Hubungan Usaha) yang diamana dalam sanksi tersebut sudah di jelaskan pada Peraturan Daerah Kota Jambi No 10 Tahun 2013 tentang Pebfebdalian dan Pengawasan tertera pada BAB 8 Sanksi Administrasi Pasal 7 yang berarti pangkalan bersangkutan bisa dihentikan kerjasamanya atau dilarang menerima pasokan lebih lanjut. Berdasarkan pernyataan – pernyataan diatas penulis menilai upaya dari pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi serta agen gas LPG 3 kg PT. Paal Merah Sumber Rezeki, terlihat bahwa mekanisme pengawasan pendistribusian LPG sudah memiliki prosedur sanksi yang jelas dan sistematis jika terjadi pelanggaran atau penyimpangan di pangkalan. Pihak Dinas menjelaskan bahwa setiap penyimpangan akan ditindak sesuai dengan tingkat kesalahan melalui sanksi bertahap: SP1 sebagai teguran lisan untuk peringatan awal,

SP2 berupa pengurangan alokasi gas sebesar 40–60% jika pangkalan mengulangi kesalahan, dan SP3 berupa PHU (Pemutus Hubungan Usaha) sebagai teguran terakhir. Mekanisme ini selaras dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan, yang mengatur sanksi administratif pada BAB 8 Pasal 7. Selain itu, pihak Dinas menegaskan bahwa pengawasan dilakukan secara aktif, termasuk sidak langsung ke pangkalan apabila ada laporan adanya pelanggaran. Agen LPG juga berperan membantu pengawasan dengan menegakkan sanksi kepada pangkalan yang nakal, sehingga distribusi dapat tetap berjalan sesuai ketentuan. Sistem sanksi bertingkat ini menunjukkan bahwa pengawasan tidak hanya sebatas monitoring, tetapi juga mengandung tindakan korektif yang nyata, memberikan kesempatan bagi pangkalan untuk memperbaiki kesalahan, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap aturan sehingga distribusi LPG tepat sasaran dan adil bagi masyarakat penerima subsidi.

E. Kesimpulan

Pengawasan Dinas
Perdagangan dan Perindustrian Kota

Jambi dalam pendistribusian LPG subsidi 3 kg di Kecamatan Paal Merah telah dilaksanakan melalui tahapan penetapan standar, pengukuran, perbandingan, serta tindakan korektif sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2013 dan Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 19 Tahun 2019. Pengawasan dilakukan melalui sosialisasi kepada agen dan pangkalan, pemanfaatan kartu kendali dan sistem digital, pemantauan lapangan, serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran distribusi. Namun, pelaksanaan pengawasan belum berjalan secara optimal. Masih ditemukan distribusi yang tidak tepat sasaran, kenaikan harga di tingkat pengecer, kelemahan dalam validasi data penerima subsidi, perbedaan mekanisme pengawasan di pangkalan, serta keterbatasan sumber daya manusia dan koordinasi antar pihak terkait. Meskipun tindakan korektif telah diterapkan melalui inspeksi dan pemberian sanksi bertahap, berbagai kendala tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara standar pengawasan dan pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan

penguatan pengawasan yang lebih terstruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta validasi data penerima subsidi yang lebih akurat agar distribusi LPG 3 kg dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Al, Jurnal et al. 2022. "Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif." : 54–64.
- Andini, Dini. 2023. "Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Pasal 3 Ayat 1 Tentang Pendistribusian Gas Tabung 3 Kg (Studi Di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)."
- Anggara, Bayu, and Syapril Abdullah. 2017. "Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru." *Publika : Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 3(2): 248–61. (July 20, 2025).
- Angger Sigit Pramukti, Meylani Cahyaningsih. 2016. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Creswell, JW. 2014. "Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches." (September 16, 2025).
- Darnoto, Sri et al. 2023. "Edukasi Keselamatan Penggunaan Tabung Gas LPG Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Inovasi Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia* 2(2): 10–14. (June 16, 2025).

- Dewi Sri, Lestari, Akhyary Edy, and Kurnianingsih Fitri. 2021. "Pengawasan Distribusi Gas Elpiji 3 Kg Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Tanjungpinang (Studi Kasus Kelurahan Pinang Kencana). (June 16, 2025).
- Dewi, Sri Ratna, Nurlaily, and Triana Dewi Seroja. 2023. "Pengawasan Pendistribusian Gas LPG 3 Kg Bersubsidi Di Kota Batam." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 10(1): 67–78.
<https://ojs.uma.ac.id/index.php/gakum/article/view/8599> (June 16, 2025).
- Dinas Pendistribusian Dan Perdagangan Kota Tanjung Balai, Oleh, and Nikmah Kholilah Lubis. 2022. "Pengawasan Pendistribusian Penggunaan Gas LPG 3 Kg Terhadap Masyarakat Oleh Dinas Pendistribusian Dan Perdagangan Kota Tanjung Balai." *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)* 2(2): 281–96. (June 16, 2025).
- Ekonomi, Jurnal et al. 2023. "Analisis Perilaku Konsumen Dalam Penggunaan Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram Menurut Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 8(1): 43–54. (September 16, 2025).
- Energi, D. M. K., & Mineral, S. D. 2015. Energi, Dirjen Migas Kementerian, dan Sumber Daya Mineral. "Statistik Minyak Dan Gas Bumi." [publik/Stat Tahunan/English/Statistik-Migas-2019.pdf](#).
- Hakim, Amirul. 2017. "Kebijakan Tarif Retribusi Pasar Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Menurut Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Di Kabupaten Indragiri Hilir."
- Hamzah, Alief Munandar, Nasrulhaq Nasrulhaq, and Riskasari Riskasari. 2022. "Manajemen Kebijakan Subsidi Liquefied Petroleum Gas (Lpg) Tabung 3 Kg Di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa." *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)* 3(1): 346–65. (June 16, 2025).
- Hidayat, Eat, and Eat Saeful Hidayat. 2019. "Analisis Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut." *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 5(4): 8–16. (September 16, 2025).
- Kholilah Lubis, Nikmah. 2022. "Pengawasan Pendistribusian Penggunaan Gas LPG 3 Kg Terhadap Masyarakat Oleh Dinas Pendistribusian Dan Perdagangan Kota Tanjung Balai." *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)* 2(2): 281–96.
- Nurchotimah, Aulia Sholichah Iman. Pengawasan Pelayanan Publik. Perundang-undangan, Peraturan. "Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian